

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA BATIK TULIS DI KABUPATEN KEBUMEN

Oleh :

Nur Arifah - 14010111130033

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro Semarang

Jalan Prof.H Soedarto, SH, Tembalang, Semarang. Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

Abstraksi

Pemberdayaan masyarakat berbasis wirausaha semakin berkembang di era globalisasi. Salah satu upaya pemberdayaan berbasis wirausaha di Kabupaten Kebumen adalah menghidupkan kembali industri atau usaha batik. Hal ini dikarenakan potensi batik Kebumen yang masih banyak ditekuni oleh masyarakat, sehingga diharapkan bisa menjadi moda industri kerajinan batik yang lebih modern. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kebumen memiliki komitmen untuk melakukan pemberdayaan terhadap pengrajin batik khas Kebumen. Inilah yang menjadi alasan penelitian dilakukan, dengan tujuan melihat sejauh mana keberhasilan program pemberdayaan batik.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, menggali data di lapangan dengan narasumber secara langsung dan dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui arsip, buku, dan sumber lain. Teknik analisa dilakukan dengan mereduksi dan menginterpretasi hasil wawancara dengan berbagai narasumber.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ada beberapa program yang berhasil, antara lain penetapan klaster unggulan, bantuan alat, pameran, bantuan modal, pemberian hak cipta dan merek. Namun ada juga program yang belum berhasil seperti pelatihan dan pemasaran yang menjelaskan bahwa program tersebut masih belum ada komitmen yang berkelanjutan dari Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Saran dari hasil temuan penelitian adalah perlunya membangun komitmen yang berkelanjutan seperti membangun kerjasama antar sektor di lingkup Pemerintah

Kabupaten Kebumen, supaya program pelatihan dan pemasaran dalam pemberdayaan batik di Kabupaten Kebumen dapat berhasil.

Kata Kunci : Peran pemerintah, pemberdayaan masyarakat, industri batik tulis.

Abstraction

Empowerment of community based of is growing in the age of globalization. One effort to empower entrepreneurs based in Kebumen is reviving the batik industry. This is because the potential of batik in Kebumen were still occupied by many people, so it is expected to be the mode of batik industry is more modern. Therefore, the Government Kebumen has committed to the empowering of the typical batik artisans Kebumen. This is the reason the research conducted, with the aim of seeing the extent to which the success the empowerment of batik.

This study used a qualitative descriptive research type with data collection through interviews, collect data in the field with the speaker directly and documentation, namely data collection through the archives, books, and other sources. mechanical analysis performed by reduction data and interpreting the results of interviews with various sources.

From the research found that there are several successful programs, among others, the establishment of clusters of excellence, support equipment, exhibits, capital, the provision of the copyright and trademark. But there are also programs that have not been as successful as training and marketing which explains that the program is still no commitment of the Government of Kebumen.

Recommendation of the research findings is the need to build a sustainable commitment of build cooperation among sectors in the scope of the Government Kebumen, so that training and marketing programs in the empowerment of batik in Kebumen can succeed.

PENDAHULUAN

Salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yaitu dengan pembangunan di sektor industri, Kabupaten Kebumen merupakan Kabupaten yang hampir secara keseluruhan bekerja pada sektor agribisnis, dengan tingkat kesuburan tanah yang lebih didominasi oleh pertanian. Akan tetapi sektor pertanian bekerja saat musim-musim tertentu, seperti saat musim panen yang dihasilkan dari persawahan

maupun perkebunan. Oleh karena itu masyarakat mulai berkembang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti berwiraswasta, membuka industri UMKM, bahkan membatik. Di beberapa wilayah di Kabupaten Kebumen masih ditemukan sebagian besar masyarakat perempuan yang gemar membatik yang bermula kegemaran membatik yang diwariskan secara turun temurun, kegemaran ini dapat mengisi waktu luang sekaligus menjadi usaha yang dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga, kemudian intervensi pemerintah daerah dilakukan dengan menghidupkan kembali usaha batik Kebumen sekaligus mengembangkan potensi batik sebagai warisan budaya di Kabupaten Kebumen.

Batik Kebumen mencapai masa puncak kejayaannya pada tahun 1960-1980, kemudian hal tersebut ditandai dengan adanya pembangunan koperasi batik yang sekarang menjadi SMK BATIK SAKTI, pada tahun 1990an batik Kebumen mengalami penurunan tingkat produktivitas yang disebabkan oleh perkembangan zaman saat itu.¹

Kemudian batik Kebumen bangkit kembali dan pada tahun 2004 ketika adanya intervensi dari pemerintah Kabupaten Kebumen, bantuan yang diberikan berupa pelatihan, sehingga hal itu dapat membantu pengrajin.

Seiring perkembangan zaman, batik terjadi permasalahan pada belum dikatakan menjadi pekerjaan utama, seperti yang terjadi pada batik tulis, hal ini disebabkan karena sebagian besar pengrajin berasal dari ibu rumah tangga, dan

¹ Berdasarkan wawancara Bapak Agus Sunaryo, selaku Ketua Pemerhati Batik Kabupaten Kebumen pada 21 Januari 2015, pukul 08.49 WIB.

penghasilan rata-rata perhari pengrajin yaitu 15 ribu rupiah, inilah yang menyebabkan bahwa batik tulis belum bisa dikategorikan menjadi pekerjaan utama.

Kemudian permasalahan lain terletak pada regenerasi dari pengrajin batik itu sendiri, susahnya mencari pengrajin yang mempunyai minat dan bakat untuk membatik, hal ini terjadi dikarenakan banyaknya masyarakat didaerah-daerah sentra industri batik tulis yang lebih memilih bekerja diluar daerah dengan harapan mempunyai penghasilan yang besar daripada menjadi pengrajin.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Batik Tulis di Kabupaten Kebumen” dengan tujuan mendeskripsikan program-program apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam memberdayakan batik tulis di Kabupaten Kebumen dan mengetahui bagaimana tingkat keberhasilan Kebijakan yang telah dibuat pemerintah Kabupaten Kebumen.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan teori tersebut peneliti menggunakan teori pemberdayaan masyarakat dengan mengkaitkan indikator keberhasilan implementasi dalam pemberdayaan masyarakat menurut Sunyoto Usman:²

- a. Bantuan dana bagi modal usaha;
- b. Pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan sosial ekonomi rakyat;

² Usman, Sunyoto. 2004. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta:Pustaka Pelajar Offset. Halaman: 21.

- c. Penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi barang dan jasa masyarakat;
- d. Pelatihan bagi sosial ekonomi masyarakat;
- e. Penguatan kelembagaan kepada masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, menggali data di lapangan dengan narasumber secara langsung dan dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui arsip, buku, dan sumber lain. Teknik analisa dilakukan dengan mereduksi dan menginterpretasi hasil wawancara dengan berbagai narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam Pemberdayaan Batik

Tulis

1.1 Penetapan Pakaian Dinas

Kebijakan penetapan pakaian dinas yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen sejak tahun 2009 yang terkandung dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2009 tentang pedoman Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, kemudian peraturan tersebut telah diperbaharui Nomor 060/573/KEP/2014, salah satunya dengan menetapkan batik Khas Kebumen sebagai pakaian dinas harian bagi para PNS di hari Kamis.³

³ Surat Keputusan Bupati Kebumen. Nomor: 060/ 573/ KEP/ 2014. Jadwal penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen.

Penetapan pakaian dinas tersebut mendapat respon positif bagi pengrajin batik:

“...Sangat berpengaruh, sekarang sewaktu batik diprioritaskan jadi warisan budaya sekarang jadi banyak setoran...”⁴

Kemudian hal serupa juga dikatakan oleh pihak pemerintah, dalam wawancara, bahwa:

“Kita salah satunya itu mba jadi hari kamis setiap PNS di Kabupaten Kebumen wajib memakai batik khas Kebumen, batik lokal, artinya itu diharapkan setiap PNS di Kebumen yang mungkin sekitar sejumlah 15 an ribu mengenakan batik Kebumen pada hari kamis, pasti kan angka penjualannya naik kan, diharapkan pengrajin itu mendapatkan pemesanan yang cukup kan?”⁵

Adanya kebijakan pemerintah tersebut dapat meningkatkan ekonomi pengrajin yang menimbulkan banyaknya pemesanan bagi sejumlah PNS diharapkan mampu membangkitkan ekonomi bagi pengrajin supaya lebih giat dalam memproduksi batik Kebumen.

1.2 Penetapan Kluster Unggulan

Penetapan batik kedalam kluster unggulan merupakan langkah pemerintah di lingkup dinas di Kabupaten Kebumen, seperti yang dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan menetapkan industri batik sebagai salah satu kluster unggulan. Hasil dari penetapan kluster unggulan adalah sebagai berikut:

⁴ Berdasarkan wawancara Wahyuni selaku pengrajin batik tulis. pada tanggal 03 Februari 2015. Pukul 10.30 WIB.

⁵ Wawancara Guruh Dwiputra, S.Hut (Kasi Hasil Pertanian), pada tanggal 25 Maret 2015, pukul 09.15 WIB.

Tabel 1.2

Hasil Perhitungan pada sektor Industri⁶

No	Komoditas	Aspek								Total	Kriteria
		A	B	C	D	E	F	G	H		
1	Batik	40	30	40	50	45	40	60	30	335	Unggulan
2	Genteng	45	45	30	40	45	30	60	30	325	Unggulan
3	Sabut Kelapa	45	45	30	30	45	30	80	20	325	Unggulan
4	Anyaman Pandan	45	45	30	30	45	30	80	20	325	Unggulan
5	Lanting	45	45	20	30	45	30	60	30	305	Unggulan
6	Meubel	40	30	30	30	30	20	80	20	280	Andalan
7	Emping Melinjo	40	30	20	20	45	30	60	30	275	Andalan
8	Gula Kelapa	40	30	20	20	45	30	60	30	275	Andalan
9	Anyaman Bambu	35	45	20	20	30	20	40	20	230	Andalan
10	Kopiah / Tas	30	30	20	20	45	20	40	20	225	Andalan

Sumber : *Data Analisis Produk Unggulan Kabupaten Kebumen, 2009*

Pengklasifikasian kluster merupakan program Bappeda dalam bidang ekonomi dilakukan dengan analisis produk unggulan daerah. berikut menurut Yunita Prasetyani dalam wawancara:

“Itu ada kajiannya, itu dulu pernah tahun 2009 kita melakukan semacam analisa kepada berbagai produk unggulan, yang ada batik Kebumen sebagai indikator, indikator termasuk mungkin ekonominya gimana, kemudian apa namanya.... Penyerap tenaga kerja seperti apa dan menggunakan SDM berapa, banyak indikator dari berbagai komoditas unggulan itu ternyata termasuk di dalamnya batik Kebumen”⁷

1.3 Pelatihan dan Pembinaan

⁶ Berdasarkan data Analisis Produk Unggulan Daerah Kabupaten Kebumen. Bappeda. Tahun 2009

⁷ Wawancara Yunita Prasetyani (Kasubid Distribusi dan Jasa Keuangan Bappeda), pada tanggal 24 Maret 2015, pukul 08.23 WIB

Pelatihan dan pembinaan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen di jajaran SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dalam konteks memberdayakan masyarakat melalui pelatihan serta pembinaan. Pelatihan serta pembinaan terhadap pelaku usaha batik termasuk didalamnya batik tulis ini mengacu pada fasilitasi pelatihan terhadap pelaku usaha batik, seperti bimtek, workshop, pendampingan, sosialisasi, seminar dan lain sebagainya.

1.4 Pemasaran

Pemasaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen adalah dengan mengikutsertakan pelaku usaha di acara pameran yang diadakan oleh berbagai pihak, hal ini dilakukan karena batik merupakan salah satu produk unggulan Kabupaten Kebumen dan diharapkan adanya pameran tersebut dapat membangun hubungan antara pelaku batik tulis dengan masyarakat. Selain itu dalam melakukan pemasaran terhadap produk batik tulis Kebumen pemerintah telah mendayagunakan berbagai cara seperti orang perorangan, media massa, PLUT, Dekranasda, dan pameran sebagai media yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mempromosikan batik tulis Kebumen.

1.5 Pameran

Pameran merupakan salah satu media untuk memperkenalkan produk-produk lokal kepada masyarakat luas khususnya batik Kebumen, dalam pameran tersebut mempunyai fungsi pemasaran atas produk-produk lokal, selain itu dengan diselenggarakan pameran tersebut mengakibatkan adanya hubungan antara masyarakat dengan pelaku batik, sehingga dengan adanya pameran tersebut

mempunyai fungsi yang terkandung didalamnya sebagai memperkenalkan produk-produk lokal kepada masyarakat luas juga sebagai pemasaran terhadap produk batik tulis itu sendiri.

1.6 Bantuan Alat

Pemberian bantuan alat yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen bermacam-macam alat, seperti kompor yang dipakai oleh pengrajin untuk membatik, sampai bahan baku batik tulis seperti mori. Pemberian bantuan alat produksi yang diberikan oleh pemerintah terhadap pelaku IKM batik yakni pelaku IKM harus sudah berbentuk kelompok atau Kelompok Usaha Bersama (KUB). fokus pemerintah Kabupaten Kebumen dalam memberdayakan batik tulis terdapat pada tiga kecamatan yakni Kecamatan Kebumen, Kecamatan Alian, dan Kecamatan Pejagoan, meskipun terdapat beberapa kecamatan lain yang memproduksi batik tulis seperti Kecamatan Kutowinangun akan tetapi yang difokuskan oleh pemerintah daerah hanya yang terdapat di sentra atau kluster seperti yang terdapat pada tiga kecamatan tersebut.

1.7 Bantuan Modal

Pemberian bantuan modal seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut merupakan program dari perbankan nasional seperti BNI, BRI, BPD Jateng, KUR bertujuan untuk membantu sektor-sektor usaha kecil yang mengalami kekurangan modal, akan tetapi aturan dari pemerintah tidak harus memakai agunan.

1.8 Pemberian Hak Cipta dan Merek

Pemberian hak cipta dan merek terhadap pelaku usaha batik dilakukan pemerintah Kabupaten Kebumen dalam memberdayakan usaha batik, karena jika

batik sudah mempunyai hak milik dan hak paten dari seseorang, maka karyanya tidak akan diklaim pihak lain, sehingga pemerintah daerah memberi perlindungan dalam pemberian hak cipta hasil karya pengrajin batik tulis tersebut.

2 Hambatan dalam Pemberdayaan Usaha Batik

2.1 Finansial

Hambatan finansial merupakan hambatan yang disebabkan oleh faktor-faktor perhitungan keuangan atau anggaran yang dihadapi baik oleh pelaku usaha batik maupun oleh pemerintah yang melakukan pemberdayaan dalam konteks industri batik tulis tersebut:

2.1.1 Hambatan Finansial bagi Pengrajin

Hambatan yang dihadapi oleh pengrajin dalam menekuni usaha seperti batik tulis adalah penghasilan yang diterima begitu minimal dibandingkan dengan pekerjaan yang lain, sehingga bagi pengrajin pekerjaan membatik bukan menjadi pekerjaan utama dibandingkan dengan saat batik mencapai puncak kejayaan tahun 1980an. Menurut pendapat Guruh Dwiputra, S.Hut:

“....Yang kedua penghasilannya sedikit mba, paling perhari paling buruh mbatik 15 ribu lah, di Kebumen, karna itu sebenarnya kerja sambil mba, bukan pekerjaan utama, memang ibu rumah tangga yang lagi mbatik sambil momong ya membatik. Jadi kalo untuk utama belum layak lah, kan 15 ribu kalo sebulan berapa paling 450 ribu”⁸

⁸ Wawancara Guruh Dwiputra, S.Hut. (Kasi Industri Hasil Pertanian) pada tanggal 25 Maret 2015 pukul 09.15 WIB

Oleh karena itu masyarakat menganggap menjadi pengrajin itu sebagian besar sebagai pekerjaan sambilan, dikarenakan melihat penghasilannya belum cukup dikatakan sebagai penghasilan utama untuk menghidupi keluarga, sehingga sebagian pengrajin memilih untuk menjadi pekerjaan sambilan, menurut penuturan Guruh Dwiputra, S.Hut:

“.....kebetulan pembatik ibu rumah tangga, mungkin punya anak kecil ya itu.... Kerja sambilan mba, sambil momong, sambil mbatik, kan lumayan kerja sambilan dapat uang sedikit mbantu ekonomi keluarga, pekerjaan rumah juga selesai kalo dikumpulkan satu tempat ya....itu kan efektif kecuali kalo sistemnya kaya besar-besaran, pengusaha batik itu bisa menggaji 1 hari 50 ribu itu bisa, tapi nilai batik tulis yang ada di Kabupaten Kebumen relative masih murah ya mba, untuk yang katakanlah menengah ya harganya 450 ribu, itu untuk membuat itu butuh waktu 1 bulan. Nilai bahannya berapa, nilai ininya berapa, sebenarnya kalo dihitung semua bisa gak cukup itu, rugi. Tapi kan karena cuma ngisi waktu ya ga rugi juga karena kan ibu rumah tangga, cuma kalo panen ya mereka gak mbatik.”⁹

Sehingga dalam meningkatkan motivasi pengrajin batik tulis menjadi kendala adanya anggaran yang sedikit yang dihasilkan dari produksi batik tulis, hal ini tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dikarenakan kebutuhan keluarga seperti bahan baku semakin naik.

2.1.1 Hambatan Finansial bagi Pemerintah Daerah

Hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam konteks anggaran guna mengalokasikan anggaran tersebut untuk memberdayakan industri batik meskipun dalam perkembangannya tidak secepat berkembang seperti daerah-daerah lain yang dominan terhadap batiknya, akan tetapi pemerintah melakukan secara bertahap dalam mengembangkan industri batik khas Kebumen, hal ini dikarenakan anggaran yang

⁹ Wawancara Guruh Dwiputra, S.Hut, pada tanggal 25 Maret 2015 pukul 09.15 WIB

terbatas sehingga pemerintah memfokuskan pada masalah yang *urgent* saja, menurut penuturan Harsono Hadi:

“Pemasaran ya dibidang perdagangan disana ada, produksi disini juga ada, terus didinas lain juga ada, Bappeda terus bagian perekonomian kalo pemasaran batik atau yang lain, tinggal nanti fokusnya kemana kemudian jika masih ada anggaran ya kita ikutkan kalo gak ya yang wajibnya dulu, karna kita kan dibatasi anggaran oleh dinas masing-masing.”¹⁰

Artinya dalam pengembangan batik Kebumen anggaran dibatasi, sehingga pemerintah fokusnya berpindah-pindah, hal ini menyebabkan kurang optimalnya dalam mengembangkan batik tulis akibat anggaran yang terbatas pada dinas masing-masing di jajaran SKPD.

2.2 Non-Finansial

Hambatan non-finansial ini berkaitan dengan aspek lain selain dengan adanya permasalahan mengenai anggaran yang dihadapi oleh pemerintah dan pelaku usaha batik tulis dalam memberdayakan industri batik di Kabupaten Kebumen.

2.2.1 Hambatan Non-Finansial bagi Pengrajin

Hambatan yang dihadapi pengrajin terkait dengan pengembangan usaha batik adalah regenerasi yang terus menyusut, hal ini terjadi adanya perkembangan teknologi dan perkembangan zaman, menuntut masyarakat untuk bertindak praktis, sehingga pekerjaan batik yang dinilai membutuhkan waktu, ketekunan, dan ketelitian sedikit demi sedikit bergeser. Seperti yang dikatakan oleh Guruh Dwiputra:

“..... Cuma memang ada kendala cukup signifikan jadi pembatik itu rata-rata kan udah sepuh nggeh, lha sementara generasi penerusnya agak susah mencarinya, jadi kita kendala paling besar digenerasi, karna memang

¹⁰ Wawancara Harsono Hadi, (staf bidang UMKM) pada tanggal 24 Maret 2015 pukul 10.31 WIB

namanyaapa namanya.... Pekerja dibatik itu kan udah sepuh, regenerasi kurang, generasi yang muda juga ndak terlalu minat.....”¹¹

Kendala regenerasi dialami oleh pengrajin karena semakin sedikitnya masyarakat yang menjadi pengrajin batik, hal ini dikarenakan menjadi pengrajin batik seperti batik tulis merupakan pekerjaan yang membutuhkan waktu dan tenaga, sementara pengrajin yang telah mahir sudah berusia lanjut, selain itu mayoritas generasi pemuda menginginkan hal yang praktis, sehingga mereka memilih menjadi buruh di daerah perkotaan daripada menjadi pengrajin.

2.2.2 Hambatan Non-Finansial bagi Pemerintah Daerah

Kemudian adanya kerjasama antar sektor yang kurang sinergis menyebabkan program-program yang dijalankan oleh SKPD saling tumpang tindih khususnya dalam pemberdayaan batik pada masing-masing dinas. Seperti yang dijelaskan oleh Tri Mujiyanto, S.Sos, M.Si, bahwa:

“Jadi sesuai dengan tupoksi kita disnakertransos lebih fokus dalam pelatihan dan keterampilannya, juga sebenarnya arah pembentukan kewirausahaan ataupun pengrajin batik yang khususnya seperti ini contohnya itu kita hanya basic pada pemberdayaan keterampilan sehingga contohnya itu satu koordinasi yang baik diantara kita paling tidak ada 4 instansi namun di Naker itu tupoksi pelatihan keterampilan, kemudian data yang sudah kita latih itu UMKM dan Koperasi diperkuat kelembagaannya kemudian setelah itu ditangkap lagi oleh Perindagsar dibidang pemasaran, sehingga apa yang disampaikan tadi pembentukan kelompok, pemberian pelatihan tidak mandek di kegiatan itu saja karena yang namanya wiraswasta wirausaha apalagi yang kelompok itu tantangan ya luar biasa, kesulitan luar biasa, banyak terjadi contohnya upamanya pelatihan menjahit, mereka kita beri keterampilan dalam waktu 20 hari itu bisa bikin baju, bukan celana, dengan polanya. Artinya kita ajarkan mulai dari pola sampai dengan jahit itu selesai 20 hari

¹¹ Wawancara Guruh Dwiputra S.Hut, (Kasi Industri Hasil Pertanian) pada tanggal 25 Maret 2015 pukul 09.15 WIB

dan pasti bisa, tapi setelah itu mereka tidak kita beri bantuan setelah itu mereka tidak punya alat, tidak bisa apa-apa dirumah.”¹²

Artinya dalam melaksanakan tupoksi masing-masing dinas menanggapi masih adanya egoisme sektoral dari para dinas tersebut, hal ini terjadi tidak hanya mengembangkan industri batik saja akan tetapi industri lain seperti menjahitpun terkendala adanya saling tumpah tindih pada pelaksanaan tupoksi masing-masing dinas yang ditargetkan sesuai dengan RPJMD, sehingga yang terjadi seperti pada pelatihan yang beberapa dinas melaksanakan tugasnya dikhawatirkan kurangnya kerjasama dinas serta kurangnya komitmen akan berdampak pada pengrajin. Akan tetapi hal ini juga ditanggapi oleh Guruh Dwiputra selaku pihak Diperindagsar Kabupaten Kebumen terkait peran yang telah dilakukan dalam pemberdayaan industri batik tulis Kebumen:

“Kalo itu saya agak gak komentar ya, karena itu secara teknis kebijakan dinas itu kan juga punya pemikiran tersendiri ya, tapi sebenarnya kalo tupoksi aksi untuk e.... apa ya mengangkat pengrajin, memberdayakan pengrajin itu sebenarnya di Disperindag, jadi kalo missal antar dinas sinerginya missal perindustrian ngasih bantuan alat, e.... terus bina, melatih, melatih itu istilahnya untuk meningkatkan skill istilahnya. Kalo mungkin di Nakertran itu melatih tapi melatih dari awal atau pemula, ini gak berbenturan, katakanlah Nakertran itu melatih dari awal/pemula, setelah pemula jadi pembatik biasanya kan ingin jadi pembatik ya, dia kan ngajuin proposal, bantuan alat, pelatihan, yang lebih apa ya istilahna, kalo UMKM itu lebih ke pemasaran dan penguatan kelembagaannya mba, kalo tiga sektor itu saling bersinergis ya malah bagus mba.”¹³

Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap dinas dalam menanggapi adanya kurangnya komitmen yang berkelanjutan dari masing-masing dinas tersebut dalam

¹² Wawancara Tri Mujiyanto M.Si, (Kabid Pelatihan dan Produktivitas) pada tanggal 24 Maret 2015 pukul 09.25 WIB

¹³ Wawancara Guruh Dwiputra S.Hut (Kasi Industri Hasil Pertanian) pada tanggal 25 Maret 2015 pukul 09.15 WIB

melaksanakan kebijakan sesuai dengan tupoksi masing-masing, sehingga dalam pelaksanaannya terjadi program yang tumpang tindih antar dinas dalam memberdayakan batik tersebut, seperti yang terjadi pada pelatihan membatik. Inilah yang menyebabkan kurangnya sinergisan antar dinas dan akibatnya banyak warga yang telah mengikuti berbagai pelatihan yang sama yang telah diadakan oleh berbagai dinas, padahal pelatihan merupakan bekal awal untuk bisa menjadi pengrajin yang lebih professional.

3. Indikator Keberhasilan Kebijakan

Indikator keberhasilan dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta menurut Sunyoto Usman (2004 : 21) mempunyai 5 indikator pokok yang telah dilakukan pemerintah dalam pemberdayaan batik tulis:

3.1 Bantuan Dana Bagi Modal Usaha

Bantuan dana yang dilakukan pemerintah dalam memberdayakan batik tulis adalah dengan cara bantuan dana bagi modal usaha berbentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk meningkatkan produktivitas batik. meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat pelaku usaha batik yang masih takut dengan bantuan dana dari pemerintah

3.2 Pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan bagi pengrajin

Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menunjang pemberdayaan batik tulis seperti memberikan pembinaan, memberikan bantuan modal, bantuan alat dalam meningkatkan produktivitas batik tulis, sehingga dapat ditarik kesimpulan

bahwa peran yang dilakukan oleh pemerintah cukup membantu dalam memberdayakan batik, program-program pemerintah telah menimbulkan dampak baik bagi pelaku usaha batik tulis khususnya industri batik di Kabupaten Kebumen.

3.3 Penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi barang dan jasa masyarakat

PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) dan Dekranasda atau Griya Pamer keduanya mempunyai fungsi promosi dan pemasaran terhadap produk-produk lokal daerah seperti produk batik Kebumen. Namun dalam hal pemasaran pemerintah perlunya komitmen yang kuat dalam memasarkan batik, pemerintah perlu mempunyai target dalam pemasaran batik, seperti memperkenalkan karakteristik batik Kebumen kepada masyarakat. Namun dalam perkembangan batik di Kabupaten Kebumen permasalahan pemasaran belum ada keberlanjutan dari pemerintah Kabupaten Kebumen.

3.4 Pelatihan Bagi pengrajin untuk meningkatkan ekonomi masyarakat

Intervensi yang dilakukan pemerintah adalah pelatihan yang telah dilakukan secara intensif oleh pemerintah daerah, pelatihan yang dilakukan tersebut sesuai dengan kebutuhan para pengrajin batik.

Akan tetapi banyaknya sektor yang ikut serta dalam program pelatihan menimbulkan dampak bagi pengrajin, seperti pelatihan yang dilakukan tidak ada keberlanjutan, serta banyaknya dinas yang melakukan program pelatihan menyebabkan kebijakan tersebut saling tumpang tindih. Oleh karena itu program pelatihan diperlukan komitmen yang berkelanjutan supaya masyarakat pemula

dalam menjadi pengrajin batik tetap menekuni, serta perlunya kerjasama antar sektor dalam menghadapi masalah regenerasi bagi pengrajin.

3.5 Penguatan Kelembagaan Kepada Masyarakat

Penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen seperti pembentukan kelompok yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) pada masyarakat khususnya pelaku usaha batik Kebumen, pembentukan kelompok tersebut berlanjut sampai sekarang, kelompok yang terbentuk terdapat di tiga Kecamatan, diantaranya Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Seliling, serta Kecamatan Kebumen.

PENUTUP

Kesimpulan

Peran yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam memberdayakan industri batik tulis di Kabupaten Kebumen banyak yang telah dilakukan, dalam pemberdayaan terdapat beberapa program yang berhasil, antara lain penetapan klaster unggulan, bantuan alat, pameran, bantuan modal, pemberian hak cipta dan merek. Namun ada juga program yang belum berhasil seperti pelatihan dan pemasaran yang menjelaskan bahwa program tersebut masih belum ada komitmen yang berkelanjutan dari Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Saran

Saran dari hasil temuan penelitian adalah perlunya membangun komitmen yang berkelanjutan seperti membangun kerjasama antar sektor di lingkup Pemerintah Kabupaten Kebumen, supaya program pelatihan dan pembinaan dalam pemberdayaan batik tulis di Kabupaten Kebumen dapat berhasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Antonius Simanjuntak, Bungaran, dkk. 2013. *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Beratha, I Nyoman. 1982. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Indah.
- E. St Harahap, dkk. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: Balai Pustaka.
- Kusrianto, Adi. 2013. *Batik, Filosofi, Motif, & Kegunaan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Moleong Lexy, J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- _____. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soetomo. 2006. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2011. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- T. Sumarnonugroho. 1984. *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Hanindita Offset.
- Usman, Sunyoto. 2003. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Vernando Wanggai, Velix. 2011. *Pembangunan Untuk Semua*. Jakarta: Bina Graha.

Wardiyatmoko, K. 1996. *Ekonomi dan Koperasi*. Jakarta: PT. Erlangga.

Hasil-hasil Penelitian

Aditya Kurniawan, Mukhamad. 2014. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Industri Genteng Sokka di Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. *Usulan Laporan Akhir*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Hari Respati, Bagus Daru. 2014. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Industri Genteng di Kabupaten Kebumen. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.

Nuki M. Nisa. 2013. Evaluasi Implementasi Program Jamsostek Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TK-LHK) Sektor Informal di Kota Semarang. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.

Ria Maharani, Deti. 2012. Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Tirtomartani Kabupaten Sleman Yogyakarta (Studi Kasus Kelompok Kandang di Desa Tirtomartani Kabupaten Sleman). *Skripsi*. Universitas Diponegoro.

Undang-Undang

Undang-undang nomor 09 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Internet

Kebumenkab.go.id. www.kebumenkab.go.id/index.php/public/page/index/24. Peta Kabupaten Kebumen.